



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIDA NIRWANA KRISTIANA

2. Jabatan : ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

3. NHK : 450451

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 780.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/144 m2 di KAB / KOTA
 CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000

 Tanah dan Bangunan Seluas 286 m2/140 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 159.000.000

MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.

 MOTOR, KAWASAKI KLX Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 17,000,000

3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

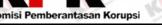
C.	HARTA BERGERAK LAINNYA			Rp.	174.565. <mark>0</mark> 00
D.	SURAT BERHARGA			Rp.	
P E.	KAS DAN SETARA KAS	KPK	KPK	Rp.	141.802. <mark>4</mark> 85
F.	HARTA LAINNYA			Rp.	
OK-	Sub Total	· No.	OK	Rp.	1.255.367.485
III. HUTANG			Rp.	352.934.354	
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)			Rp.	902.433.131	

Catatan:

^{1.} Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara







Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

